

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Kinerja pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan seiring dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Pemerintah daerah harus mampu menghadapi dan mengikuti tuntutan publik dan perkembangan global yang semakin dinamis. Strategi dan kebijakan yang tepat serta pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. Dalam konteks penelitian ini, beberapa simpulan yang dapat ditarik terkait model strategi inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan mengacu pada rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Semua variabel mendapatkan capaian dalam kategori ‘tinggi’ yang bermakna bahwa pemerintah daerah sudah mempertimbangkan lingkungan digital dinamis dan kepemimpinan transformasional dinamis dalam mengintegrasikan strategi inovasi digital, implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik.
2. Lingkungan digital dinamis dan kepemimpinan transformasional dinamis tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan kata lain, kedua faktor ini perlu melalui mediasi lain agar dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Kepemimpinan Transformasional Dinamis memediasi pengaruh Lingkungan Digital Dinamis terhadap Strategi Inovasi Digital. Ini bermakna bahwa sinergi antara kepemimpinan transformasional dengan lingkungan digital dinamis mampu mendorong pengembangan strategi inovasi digital yang lebih efektif di pemerintahan daerah.
4. Kepemimpinan Transformasional dan Strategi Inovasi Digital memediasi pengaruh Lingkungan Digital Dinamis terhadap Implementasi *e-government*. Artinya, kepemimpinan yang inovatif serta strategi digital yang kuat memperkuat hubungan antara lingkungan digital yang berubah dengan keberhasilan implementasi *e-government*.

5. Kepemimpinan Transformasional, Strategi Inovasi Digital, dan Implementasi *e-government* memediasi pengaruh Lingkungan Digital Dinamis terhadap Mutu Pelayanan Publik. Ini menunjukkan bahwa interaksi antara kepemimpinan, inovasi digital, dan *e-government* sangat penting untuk memastikan kualitas layanan publik yang lebih tinggi di bawah tekanan lingkungan digital yang dinamis.
6. Kepemimpinan Transformasional, Strategi Inovasi Digital, Implementasi *e-government*, dan Mutu Pelayanan Publik memediasi pengaruh Lingkungan Digital Dinamis terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, kombinasi faktor-faktor ini berperan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam konteks lingkungan digital yang cepat berubah.
7. Strategi Inovasi Digital memediasi pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Implementasi *e-government*. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan transformasional yang efektif mendorong strategi inovasi digital, yang pada gilirannya mempercepat implementasi *e-government* di pemerintahan daerah.
8. Strategi Inovasi Digital dan Implementasi *e-government* memediasi pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Mutu Pelayanan Publik. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang transformasional akan lebih efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan publik jika diiringi dengan strategi inovasi digital dan implementasi *e-government*.
9. Strategi Inovasi Digital, Implementasi *e-government*, dan Mutu Pelayanan Publik memediasi pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dinamis terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menekankan pentingnya inovasi digital dan peningkatan mutu layanan publik dalam memperkuat dampak kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pemerintah daerah.
10. Implementasi *e-government* memediasi pengaruh Strategi Inovasi Digital terhadap Mutu Pelayanan Publik. Ini menunjukkan bahwa inovasi digital harus diikuti oleh implementasi *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
11. Implementasi *e-government* dan Mutu Pelayanan Publik memediasi pengaruh Strategi Inovasi Digital terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan adanya *e-government* dan Mutu Pelayanan Publik, strategi inovasi digital dapat

diimplementasikan lebih efektif, sehingga memperbaiki Kinerja Pemerintah Daerah secara signifikan.

12. Mutu Pelayanan Publik memediasi pengaruh Implementasi *e-government* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Artinya, keberhasilan *e-government* akan tercermin dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah jika mutu pelayanan publik meningkat terlebih dahulu.

5.2. Implikasi

Berikut dikemukakan beberapa implikasi teoretis dan praktik dari hasil penelitian terkait model strategi inovasi digital, implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah berbasis lingkungan digital dinamis dan kepemimpinan transformasional dinamis.

Secara teoritis:

1. Penelitian ini menambah wawasan dan memperkuat teori bahwa perhatian terhadap lingkungan digital yang dinamis memiliki hubungan erat dengan keberhasilan kepemimpinan transformasional, strategi inovasi digital, implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik. Ini menambah literatur yang membahas pentingnya integrasi antara penerapan teknologi digital dengan kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi yang optimal.
2. Temuan memperkuat teori mengenai pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan berorientasi pada perubahan dalam konteks organisasi publik. Praktisi di pemerintahan sebaiknya mengembangkan kompetensi kepemimpinan transformasional, khususnya dalam aspek *idealized influence* dan *intellectual stimulation*, untuk merancang dan mengimplementasikan strategi inovasi digital yang tepat guna, implementasi *e-government* yang berhasil, pelayanan publik yang bermutu, dan pemerintah daerah yang berkinerja tinggi
3. Temuan terkait strategi inovasi digital saat ini menjadi kontribusi teoretis yang penting dalam memperkaya konsep strategi inovasi digital dalam sektor pelayanan publik, khususnya dalam implementasi teknologi digital untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan. Pada praktisnya, ini berimplikasi pada upaya pemerintah daerah untuk fokus pada *architectural innovation* dan *disruptive innovation* sehingga dapat lebih mendorong

keberhasilan implementasi *e-government*, pencapaian mutu pelayanan publik, dan tentunya peningkatan kinerja pemerintah daerah.

4. Implementasi *e-government* berimplikasi teoritis pada pentingnya sebagai salah satu faktor utama dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Secara praktik, pemerintah daerah dalam hal ini perlu mempertahankan peningkatan proses administrasi internal agar dampaknya lebih terasa dalam mencapai mutu pelayanan publik yang diharapkan serta kinerja pemerintah daerah yang terus meningkat.

Secara praktis:

1. Pada prinsipnya, lingkungan digital yang dinamis memiliki hubungan erat dengan keberhasilan kepemimpinan transformasional, strategi inovasi digital, implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu meningkatkan *ICT infrastructure* agar dapat mendukung lingkungan digital yang dinamis untuk mendorong implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik yang lebih baik. Mutu pelayanan publik mencerminkan suatu elemen yang tidak bisa dipisahkan dari kinerja pemerintah daerah. Secara praktis, mutu pelayanan publik perlu lebih fokus pada *process quality* dan *output quality* sehingga dapat lebih bersinergi dengan variabel-variabel lain, khususnya dengan implementasi *e-government* dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan.
2. Pemimpin di sektor pemerintah daerah harus memiliki kemampuan kepemimpinan transformasional agar mampu menginspirasi, mengarahkan, dan mengadopsi strategi inovasi, implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik berbasis teknologi dengan lebih efektif
3. Strategi inovasi digital *Incremental Innovation* perlu disusun dilakukan secara bertahap dan dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga implementasi *e-government* dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif
4. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan sinergi antara lingkungan digital yang dinamis, kepemimpinan transformasional dinamis, strategi inovasi digital, implementasi *e-government*, dan peningkatan mutu pelayanan publik. Pemerintah daerah harus

memprioritaskan pengembangan strategi inovasi digital yang terintegrasi dengan implementasi *e-government* guna menciptakan layanan publik yang transparan, efisien, dan responsif. Selain itu, fokus pada peningkatan mutu pelayanan publik menjadi kunci utama dalam mencerminkan keberhasilan transformasi digital dan kepemimpinan.

5. Pelatihan kepemimpinan transformasional yang berorientasi inovasi dan kolaborasi teknologi juga perlu ditingkatkan untuk mendorong adopsi inovasi yang lebih efektif. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat, sekaligus mengoptimalkan kinerja organisasi di era digital.

5.3. Rekomendasi

Berikut ini diusulkan beberapa rekomendasi atau saran berdasarkan hasil temuan penelitian terkait dengan model strategi inovasi digital, implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah berbasis lingkungan digital dinamis dan kepemimpinan transformasional dinamis. Rekomendasi ini dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu rekomendasi untuk (1) pemerintah pusat; (2) unit analisis (pemerintah daerah); dan (3) untuk penelitian selanjutnya, termasuk rekomendasi dari novelty.

1. Rekomendasi untuk Pemerintah

- a. Bagi pemerintah diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan nasional yang lebih adaptif dalam mendukung digitalisasi di pemerintahan daerah, dengan fokus pada penguatan sistem *e-government*, keamanan siber dan perlindungan data publik, mendorong inovasi digital dengan memberikan fleksibilitas dalam pengembangan sistem teknologi informasi di daerah.
- b. Meningkatkan dukungan infrastruktur digital, pengembangan pusat data nasional dan pemberian insentif keuangan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan *ICT infrastructure* yang didukung oleh pemutakhiran dan keamanan digital, terutama di daerah-daerah yang tertinggal, agar lingkungan digital dinamis dapat lebih berkembang dan mendukung kinerja pemerintah daerah. Kebijakan ini harus memastikan

pemerataan akses teknologi untuk seluruh pemerintah daerah dan masyarakat.

- c. Untuk meningkatkan kepemimpinan pemerintah daerah, diperlukan upaya untuk pelatihan dibidang kepemimpinan transformasional dan strategi inovasi digital bagi para pejabat daerah yang dilakukan secara periodik guna menguatkan kemampuan dalam menghadapi perubahan teknologi yang dinamis dan isu strategis lainnya.

2. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

- a. Bagi pimpinan pemerintah daerah, diperlukan upaya mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional yang berfokus pada *idealized influence* dan *intellectual stimulation* guna merancang strategi inovasi digital, implementasi *e-government*, peningkatan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.
- b. Pemerintah daerah perlu merancang dan mengembangkan model strategi inovasi digital yang lebih fokus pada *architectural innovation* dan *disruptive innovation* yang implementasinya dilakukan secara bertahap.
- c. Pemerintah daerah perlu mengembangkan infrastruktur digital daerah yang terintegrasi, adaptif dan fleksibel dalam memberikan pelayanan publik, menghadapi perubahan lingkungan digital dinamis dan tuntutan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk tim khusus yang memiliki kompetensi dalam analisis teknologi dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah, yang dibantu dengan penerapan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*, *Big Data Analytics*, dan *Internet of Things (IoT)* untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- d. Pemerintah daerah perlu melakukan *Cost and time saving* secara berkelanjutan dengan menggunakan teknologi digital untuk mempermudah layanan internal dan eksternal yang ditunjang oleh peningkatan kapasitas SDM dibidang teknologi informasi. Digitalisasi layanan yang terintegrasi berbasis *Single Sign-On (SSO)* menjadikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan pemerintahan hanya dengan satu akun. Selain itu pemerintah daerah dapat menghemat biaya operasional dan masyarakat bisa mengakses layanan tanpa harus membuang banyak

waktu. Penguatan sistem *e-government* harus disertai evaluasi berkala agar peningkatan mutu pelayanan publik dapat diukur dan ditingkatkan.

- e. Penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Mutu Desain (*Design Quality*) yang mengacu pada bagaimana pelayanan dirancang dan disusun agar lebih efektif, efisien, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan mutu desain dalam pelayanan publik dapat dilakukan mulai pada tahap perencanaan pembuatan keputusan dengan menggunakan pendekatan desain yang berorientasi pada pengguna dan didukung oleh peningkatan kompetensi SDM dalam desain layanan. Peningkatan kualitas pelayanan harus mengutamakan keberlanjutan serta keterlibatan masyarakat dalam evaluasi layanan, penetapan standar pelayanan berbasis digital, sistem pelayanan dan pengaduan yang terintegrasi.

3. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meningkatkan jumlah responden untuk mendapatkan data yang lebih representatif dan meminimalkan bias dalam kuesioner. Selain itu, penelitian dapat lebih mendalam dengan mempertimbangkan variabel lain yang mungkin memengaruhi kinerja pemerintah daerah, seperti faktor motivasi SDM, budaya organisasi dan pengaruh eksternal lainnya. Penggunaan *mixed methods* pada penelitian berikutnya juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Terakhir, memperluas cakupan penelitian ke provinsi lain di Indonesia dapat membantu dalam generalisasi temuan dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang strategi inovasi digital, implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik di berbagai konteks pemerintahan daerah.

Berdasarkan *novelty* penelitian, perhatian pada lingkungan digital dinamis dapat mendorong strategi inovasi digital, yang kemudian memperkuat implementasi *e-government* untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Peningkatan kualitas layanan publik ini akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.